

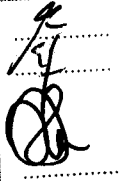
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, Laporan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014 telah selesai disusun. Laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumberdaya (*input*) dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2014 dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance and Clean Government*.

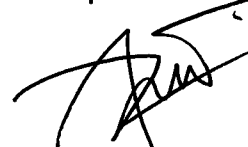
Selain memuat berbagai informasi dari aspek sumberdaya manusia, anggaran, kegiatan utama maupun kegiatan penunjang yang merupakan implementasi atas tugas dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal, laporan ini memuat perkembangan hasil pelaksanaan kinerja selama tahun 2014.

Secara garis besar capaian kinerja tahun 2014 disampaikan dengan maksud memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja secara periodikal. Disadari bahwa materi yang disajikan belum dapat memenuhi seluruh harapan, oleh karena itu bilamana memungkinkan akan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan pelaporan ke depan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini, diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat berguna bagi pimpinan instansi dan pihak-pihak terkait.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Itjen Kabag Perencanaan Kasubag : Evaluasi dan Pelaporan	

Jakarta, Februari 2015
Inspektur Jenderal



Ir. R. Azis Hidajat, MM
NIP. 19570426 198503 1 001

KATA PENGANTAR

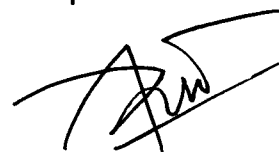
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, Laporan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014 telah selesai disusun. Laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumberdaya (*input*) dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2014 dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance and Clean Government*.

Selain memuat berbagai informasi dari aspek sumberdaya manusia, anggaran, kegiatan utama maupun kegiatan penunjang yang merupakan implementasi atas tugas dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal, laporan ini memuat perkembangan hasil pelaksanaan kinerja selama tahun 2014.

Secara garis besar capaian kinerja tahun 2014 disampaikan dengan maksud memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja secara periodikal. Disadari bahwa materi yang disajikan belum dapat memenuhi seluruh harapan, oleh karena itu bilamana memungkinkan akan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan pelaporan ke depan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini, diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat berguna bagi pimpinan instansi dan pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2015
Inspektur Jenderal



Ir. R. Azis Hidayat, MM
NIP. 19570426 198503 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
BAB II ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	3
A. Organisasi	3
B. Kepegawaian	6
BAB III KERAGAAN ANGGARAN	9
A. Perkembangan Realisasi Anggaran	9
B. Capaian Kinerja	11
BAB IV KERAGAAN KEGIATAN	13
1. Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.018)	13
2. Pengawasan.....	14
3. Evaluasi Kegiatan Strategis	15
4. Audit Kinerja	18
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2013	22
6. Evaluasi Kinerja LHA lingkup Eselon I	25
7. Gerakan WTP	26
8. Reviu RKA-KL 2014.....	28
9. Audit Investigasi	28
10. Audit Tujuan Tertentu	30
11. Audit Sanggah Banding	31
12. Pembinaan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	31

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN TAHUN 2014

13. Penggalangan Tekad Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi	34
14. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelaksanaan Diklat	38
15. Pengadaan Sarana dan Prasarana	39
BAB VI PENUTUP	41
LAMPIRAN	42

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010	5
Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat lingkup Itjen Deptan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010	5
Gambar 4. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	6
Gambar 5. Data Komposisi Fungsional Auditor	6
Gambar 6. Data Komposisi Fungsional Tertentu	7
Gambar 7a. Data Pegawai Berdasarkan Golongan	7
Gambar 7b. Data Pegawai Berdasarkan Rincian Pegawai.....	8
Gambar 8. Perkembangan Realisasi Anggaran Per bulan.....	9
Gambar 9. Tren Capaian Unit Kerja dengan Predikat SPI Cukup Handal.....	34

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Realisasi Bulanan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014	10
Tabel 2. Realisasi Per Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014	10
Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014.....	12
Tabel 4. Keragaan Kegiatan Evaluasi Strategis	15
Tabel 5. Keragaan Capaian Audit Kinerja Tahun 2014	19
Tabel 6. Keragaan Capaian Audit Kinerja Per Inspektorat Tahun 2014	19
Tabel 7. Deskripsi Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun 2010 s.d. 2014	20
Tabel 8. Data Nilai Kerugian Negara Per Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014	20
Tabel 9. Deskripsi Besaran Anggaran Kementan yang diaudit serta Nilai Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan ItjenTahun 2010 s.d. 2014	21
Tabel 10. Deskripsi Capaian Indikator 3E atas Kinerja Itjen Periode Tahun 2010 s.d. 2014	21
Tabel 11. Deskripsi Nilai Kerugian Negara Kementan Tahun 2010 – 2014	22
Tabel 12. Hasil Evaluasi AKIP Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2013	23
Tabel 13. Simpulan Kelemahan dan Rekomendasi Kementerian PAN dan RB terhadap AKIP Kementerian Pertanian Tahun 2013	24
Tabel 14. Hasil Penilaian LAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2009 s.d. 2013 ..	25
Tabel 15. Keragaan Pelaksanaan Audit BMN lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2014	27
Tabel 16. Keragaan Tema Pengaduan Audit Investigasi Tahun 2014	29
Tabel 17. Keragaan Tema Audit Tujuan Tertentu Tahun 2014	30
Tabel 18. Keragaan Audit Sanggah Banding Tahun 2014	31
Tabel 19. Hasil Penilaian SPI lingkup Unit Kerja Eselon I/UPT Kementan 2010 s.d. 2014	33
Tabel 20. Keragaan Hasil Penilaian Unit Kerja WBK Tahun 2014	37
Tabel 21. Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2014	40

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor pertanian memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Kontribusi Kementerian Pertanian dalam mendukung dan memfasilitasi masyarakat pertanian sangat jelas terlihat, utamanya dalam upaya penyediaan pangan nasional bagi 245 juta penduduk Indonesia; penyedia 87% bahan baku industri kecil dan menengah; penyumbang 14,72% PDB; penghasil devisa negara US\$43,37 M; menyerap 33,32 % total tenaga kerja; sumber utama (70%) pendapatan rumah tangga perdesaan dan berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca 8 juta ton.

Dalam rangka mewujudkan Nawacita ke 7 tentang "Peningkatan Kedaulatan Pangan" Kementerian Pertanian telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya.

Peningkatan Kedaulatan Pangan merupakan salah satu dari komponen Nawacita. Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (1) Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) Mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Sasaran kedaulatan pangan terdiri dari: (1) Peningkatan ketersediaan pangan bersumber produksi dalam negeri untuk komoditas padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula; (2) Peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan; (3) Peningkatan kualitas konsumsi pangan seimbang; dan (4) Tersedianya Sarana dan Prasarana Irigasi yang terdiri dari terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta Ha, terehabilitasinya jaringan irigasi 3 juta Ha, terbangunnya dan meningkatnya jaringan irigasi tambak 115 ribu Ha, dan terbangunnya 50 waduk baru. Paradigma baru pengawasan menjadikan peran Inspektorat Jenderal sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) atas terlaksananya program dan kegiatan di lingkup Kementerian Pertanian. Didukung pula dengan strategi pengawasan *GREEN AUDITS* peran Inspektorat Jenderal sebagai APIP mampu membawa perubahan positif dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian, tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Bentuk konkrit dari penyelenggaraan pengawasan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai kebijakan bidang pertanian untuk memperoleh umpan balik, evaluasi akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan laporan tahun 2014 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang memadai tentang keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2014. Selain itu secara ringkas disampaikan pula hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan ditahun yang akan datang.

BAB II

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

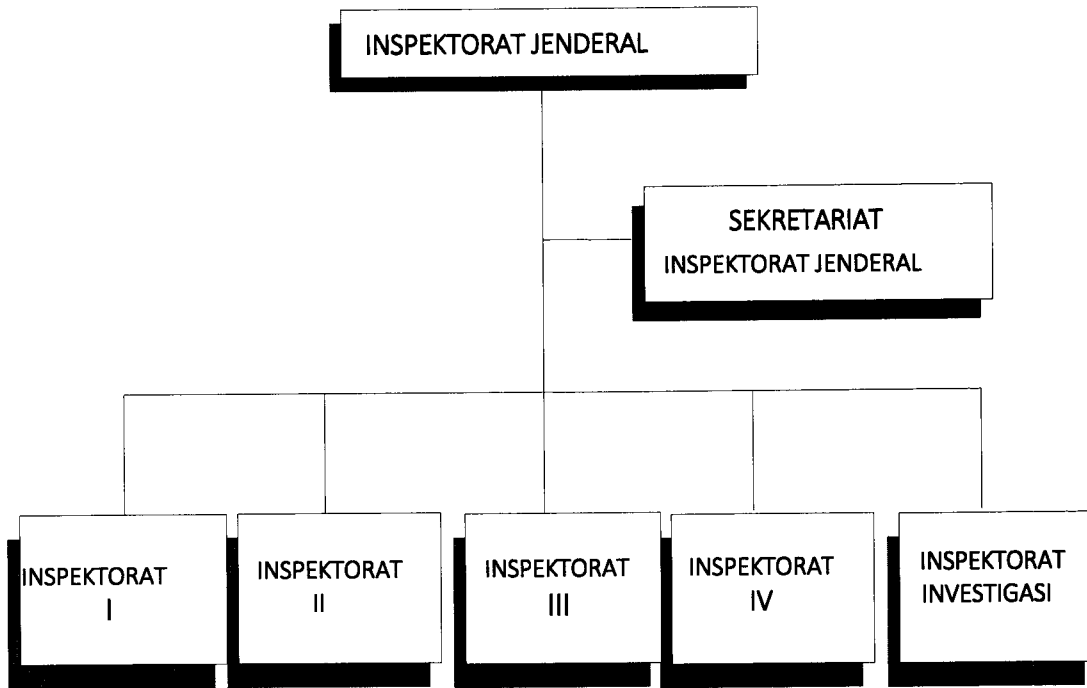
A. ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi; a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; dan e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat Investigasi

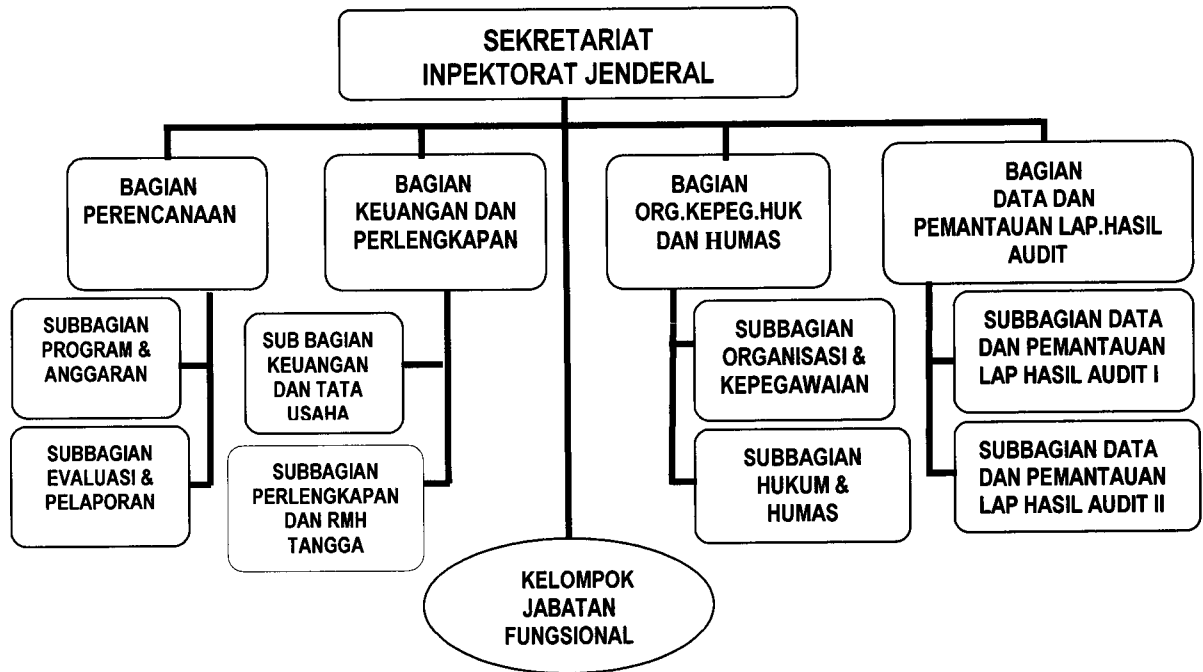
Bagan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 1.
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010

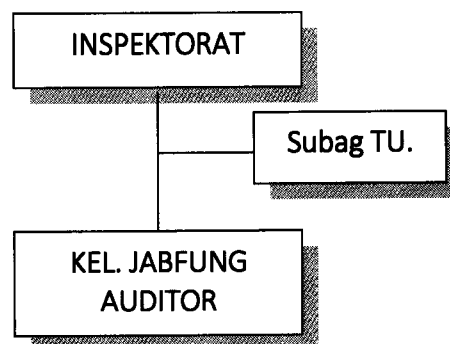


Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal seperti tampak pada gambar berikut :

Gambar 2.
Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010.



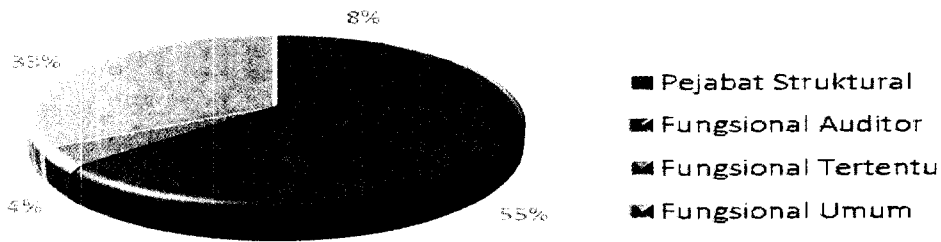
Gambar 3.
Struktur Organisasi Inspektorat lingkup Itjen Deptan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010.



B.KEPEGAWAIAN

Gambar 4.

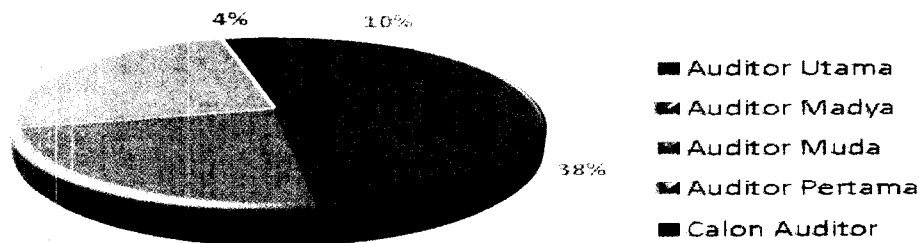
DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN



Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sampai dengan Desember 2014 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 285 pegawai dengan rincian sebagai berikut : 157 orang (55%) fungsional Auditor, 11 orang (4%) fungsional tertentu (fungsional kepegawaian, fungsional perencana, arsiparis dan pengelola PBJ), 24 orang (8%) pejabat struktural, dan 93 orang (33%) fungsional umum.

Gambar 5.

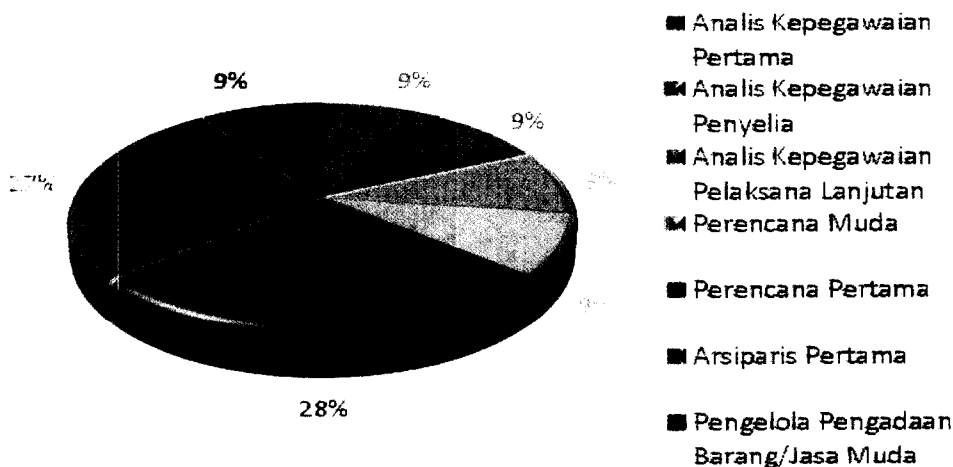
DATA KOMPOSISI FUNGSIONAL AUDITOR



Komposisi fungsional auditor yang berjumlah 157 orang dapat dijabarkan sebagai berikut : 16 orang (10%) Auditor Utama, 59 orang (38%) Auditor Madya, 37 orang (23%) Auditor Muda, 39 orang (25%) Auditor Pertama, dan 6 orang (4%) Calon Auditor.

Gambar 6.

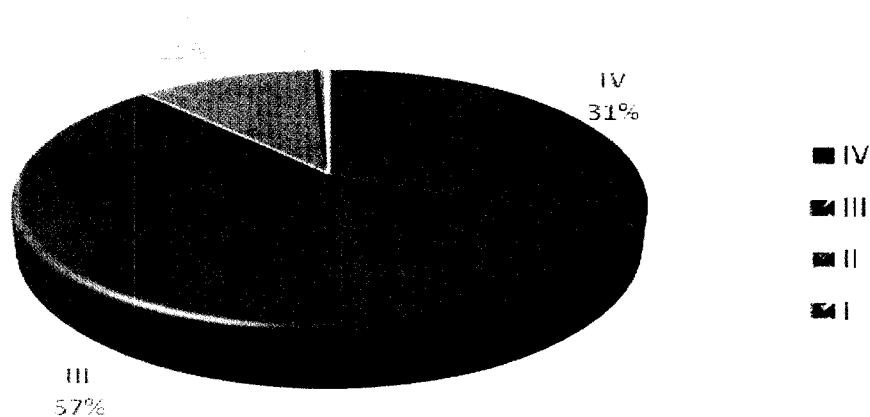
DATA KOMPOSISI FUNGSIONAL TERTENTU



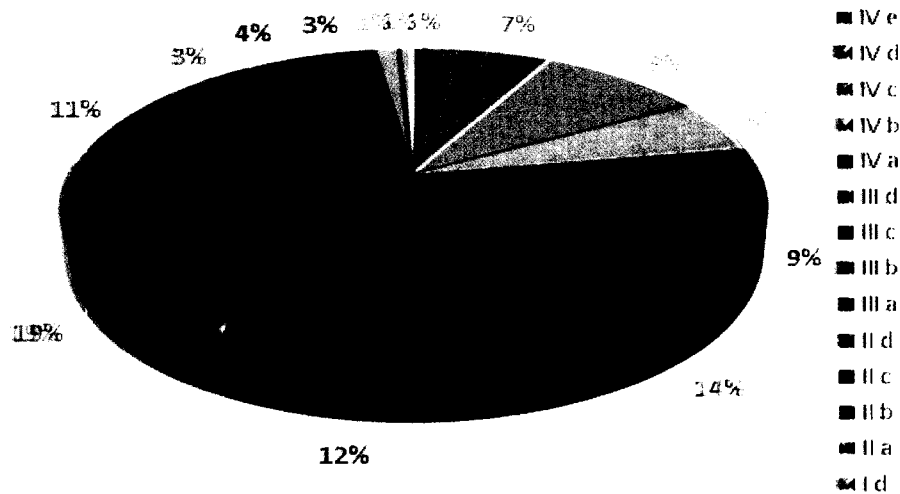
Komposisi fungsional tertentu yang berjumlah 11 orang terdiri dari 1 orang (9%) Analisis Kepegawaian Pertama, 1 orang (9%) Analisis Kepegawaian Penyelia, 1 orang (9%) Analisis Kepegawaian Pelaksanaan Lanjutan, 1 orang (9%) orang Perencana Muda, 3 orang (28%) Perencana Pertama, 3 orang (27%) Arsiparis Pertama dan 1 orang (9%) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda.

Gambar 7a.
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



7b.
Data Pegawai Berdasarkan Rincian Golongan



Berdasarkan golongan dan ruang, pegawai Inspektorat Jenderal terdiri dari 89 orang (31%) golongan IV, 162 orang (57%) golongan III, 32 orang (11%) golongan II, dan 2 orang (1%) golongan I.

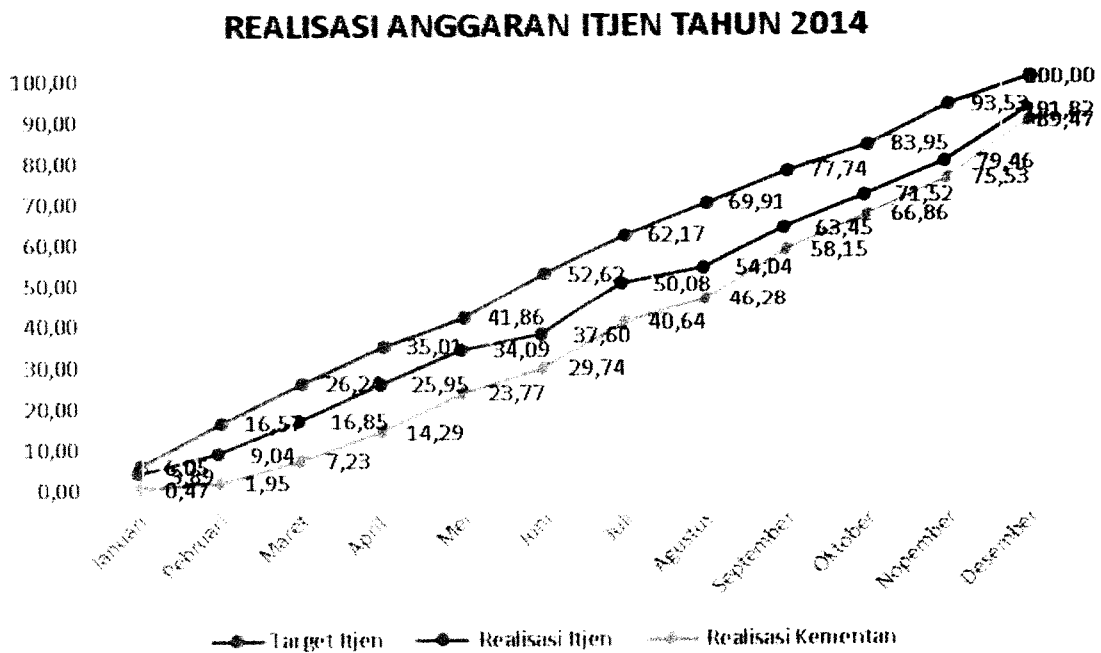
Secara lebih rinci komposisi golongan dan ruang dipaparkan sebagai berikut : 2 orang (1%) golongan IV e, 20 orang (7%) golongan IV/d, 26 orang (9%) golongan IV/c, 16 orang (6%) golongan IV/b, 25 orang (9%) golongan IV/a, 41 orang (14%) golongan III/d, 35 orang (12%) golongan III/c, 53 orang (19%) golongan III/b, 33 orang (11%) golongan III/a, 8 orang (3%) golongan II/d, 12 orang (4%) golongan II/c, 8 orang (3%) golongan II/b, 4 orang (1%) golongan II/a, dan 2 orang (1%) golongan I/d.

BAB III KERAGAAN ANGGARAN

A. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN

Untuk tahun anggaran 2014, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan 4 Sukses Pembangunan Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diberikan amanah untuk melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Perlu diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2014 realisasi anggaran adalah sebesar Rp60.170.175.443 atau 91,82% dari total anggaran sebesar Rp65.528.157.000.

Gambar 8.
Perkembangan Realisasi Anggaran per Bulan



Tabel 1.

Realisasi Bulanan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014

Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Januari	3.964.703.067	2.548.083.605	3,89
Pebruari	6.890.063.391	3.373.649.776	5,15
Maret	6.337.145.060	5.120.764.911	7,81
April	5.748.638.887	5.964.995.201	9,10
Mei	4.487.034.720	5.328.276.176	8,13
Juni	7.054.524.723	2.303.007.978	3,51
Juli	6.259.379.553	8.176.840.381	12,48
Agustus	5.066.825.721	2.593.246.935	3,96
September	5.131.687.723	6.170.341.269	9,42
Oktober	4.071.673.558	5.289.094.463	8,07
Nopember	6.277.296.795	5.199.285.334	7,93
Desember	4.239.183.809	8.102.589.421	12,37
JUMLAH	65.528.157.000	60.170.175.443	91,82

Tren perkembangan realisasi anggaran tahun 2014 terlihat tabel di atas dengan realisasi terbesar adalah pada bulan Juli 2014 yaitu sebesar Rp8.176.840.381 atau 12,48% dari target serapan Rp6.259.379.553 dan realisasi terkecil adalah pada bulan Juni 2014 yaitu sebesar Rp2.303.007.978 atau 3,51% dari target Rp7.054.524.723,-

Apabila dibandingkan dengan laju serapan tingkat Kementerian Pertanian sebagaimana tergambar dalam gambar 8. Inspektorat Jenderal mampu merealisasikan anggaran diatas laju serapan tingkat Kementerian Pertanian.

Pagu anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2014 sebesar Rp65.528.157.000,- seluruhnya berasal dari rupiah murni. Adapun rincian realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.

Realisasi Per Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014

Kode	Jenis Belanja	PAGU DIPA (Rp juta)	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
51	Belanja pegawai	20.179	18.087	89.63	2.092	10.37
52	Belanja barang	44.648	41.432	92.80	3.038	6.81
53	Belanja modal	700	650	92.97	49	7.03
Jumlah belanja		65.528	60.170	91.82	5.179	8.18

B. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai 101,86%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp60.170.175.450,- atau 91,82%.

Beberapa capaian kinerja dapat disampaikan sebagai berikut : 1). Audit Kinerja Pusat dan Daerah terhadap 427 satker (102,64%); 2). Audit Investigasi sebanyak 27 kasus (112,5%); 3). Evaluasi kegiatan strategis sebanyak 4 laporan (100%); 5). Penggalangan/Pembinaan Tekad Anti Korupsi di lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 1 laporan (100%); 6) Penyelenggaraan Kegiatan SPIP sebanyak 2 laporan (100%); 7) Evaluasi LAKIP 12 Eselon I sebanyak 13 laporan (100%); 8). Reviu Laporan Keuangan sebanyak 26 laporan (100%); dan 9) Audit BMN dalam rangka mendukung Gerakan WTP sebanyak 4 laporan (100%). Secara rinci capaian Inspektorat Jenderal terdeskripsi pada tabel berikut:

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN TAHUN 2014

Tabel. 3
Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2014

No	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	JUMLAH ANGGARAN			OUTPUT				
			PAGU	REALISASI		TARGET		REALISASI		
				Rp.	Rp.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	018.02.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN	66.628.167.000	60.170.176.460	91,82					101,86
I	1755 s.d 1756	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan lingkup Inspektorat I s.d IV								
	002	Reviu Laporan Keuangan Eselon I dan Kementerian Pertanian	1.348.000.000	1.188.209.352	88,15	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	100,00
	004	Audit Kinerja Pusat dan Daerah	15.494.600.000	15.161.211.935	97,85	416 satker	427 satker	427 satker	427 satker	102,64
	005	Evaluasi LAKIP lingkup Eselon I	1.336.000.000	1.155.438.980	86,48	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100,00
	006	Evaluasi Kegiatan Strategis	1.212.000.000	1.108.076.052	91,43	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00
	009	Laporan Pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat I s.d IV	1.790.900.000	1.718.450.412	95,95	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00
II	1759	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan lingkup Inspektorat Investigasi								
	002	Penggalangan/Pembinaan Tekad Anti korupsi	2.636.700.000	2.397.430.954	90,93	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	003	Audit Sanggah banding	200.800.000	107.191.500	53,38	10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	40,00
	004	Audit Khusus/Investigasi	1.057.200.000	917.982.265	86,83	24 Kasus	27 Kasus	27 Kasus	27 Kasus	112,50
	005	Audit dengan Tujuan Tertentu	1.250.000.000	1.177.565.173	94,21	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	200,00
	008	Laporan Pelaksanaan kegiatan Pengawasan lingkup Inspektorat Investigasi	57.100.000	50.510.000	88,46	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00
III	1760	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal								
	001	Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran, perencanaan kinerja dan perencanaan pengawasan	402.800.000	222.528.827	55,25	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00
	002	Laporan Pelaksanaan kegiatan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, organisasi kepegawaian hukum dan humas, data dan pemantauan LHA serta laporan progres	3.663.500.000	3.104.164.281	84,73	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100,00
	003	Laporan Hasil Koordinasi, pembinaan dan monitoring kegiatan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, organisasi kepegawaian hukum dan humas serta data dan pemantauan LHA	4.363.600.000	4.264.118.385	97,72	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00
	004	Laporan pelaksanaan dukungan teknis di lingkup Itjen Kementan	5.759.500.000	5.304.225.449	92,10	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100,00
	005	Dokumen analisis LHA	403.200.000	214.974.300	53,32	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00
	006	Diklat fungsional dan teknis bidang pengawasan	408.700.000	257.806.000	63,08	2 Diklat	2 Diklat	2 Diklat	2 Diklat	100,00
	010	Sarana dan Prasarana Perkantoran	563.325.000	519.504.480	92,22	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100,00
	994	Layanan Perkantoran	23.443.557.000	21.169.521.605	90,30	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00
	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	136.675.000	131.265.500	96,04	52 unit	52 unit	52 unit	52 unit	100,00
		J U M L A H	66.628.167.000	60.170.176.460	91,82					101,86

BAB IV

KERAGAAN KEGIATAN

Sejalan dengan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang dimulai tahun 2010 setiap kementerian/lembaga harus menrestrukturisasi program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan *performance based budgeting* sehingga setiap unit kerja harus memiliki indikator kinerja, merencanakan program/kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi capaian indikator kinerjanya sendiri. Secara umum strategi pengawasan Itjen Kementan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemeriksaan, meningkatkan ketersediaan anggaran melalui kerjasama dengan instansi lingkup Kementan maupun instansi lain, meningkatkan efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, dan mendorong berfungsinya pengawasan melekat (*waskat*) atasan terhadap bawahan pada setiap unit kerja, serta memfungsikan LAKIP sesuai dengan Inpres No.7 tahun 1999.

A. PROGRAM PENGAWASAN

Sesuai dengan Perpres No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, program kerja Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan mengacu kepada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Adapun capaian kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.018).

Reviu bertujuan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian serta pengakuan, pengukuran, pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas. Metodologi reviu laporan keuangan kementerian keuangan dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan serta dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari UAKPA/B, UAPPA/B-W dan UAPPA/B-E1. Reviu dititikberatkan pada akun laporan keuangan yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Tahun 2013 telah melaksanakan dua kali reviu atas Laporan Keuangan (LK) UAPA/B Kementerian Pertanian pada Bagian Anggaran 018 (BA.018). Reviu pertama dilakukan atas Laporan Keuangan Semester I

Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 25 Juli 2014 terhadap 12 Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian dengan jumlah satker sebanyak 1.440 satker dari total anggaran sebesar Rp15.470.610.980.000,00.

Keberhasilan yang telah dicapai pada Semester I Tahun 2014, yaitu dari 1.440 satker, 1.373 satker (95,34%) telah mengirimkan laporan keuangan dan telah dikonsolidasi di laporan keuangan kementerian, dan 67 satker (1,72%) belum mengirimkan laporan tersebut. Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Semester I tahun 2014 berdasarkan data dari Eselon I sebanyak 1.373 satker (95,34%).

Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014, dapat disampaikan catatan penting sebagai berikut:

- a. Hasil rekonsiliasi antara Sistem Akutansi Umum (SAU) Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kementerian Pertanian masih terdapat perbedaan data.
- b. Terdapat perbedaan data antara Neraca SAK dan Neraca LBPS Semester I tahun 2014 atas akun Persediaan, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Irigasi dan Jaringan, serta Aset tetap lainnya.
- c. Persediaan yang berasal dari realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) belum dicatat dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.

2. Pengawasan

Pengawasan terhadap Persiapan Pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) TA. 2014 untuk penyediaan bibit kegiatan Bongkar Ratoon dan ekstensifikasi program pengembangan tebu tahun 2014 yang dilaksanakan dengan tim Ditjen Perkebunan pada tanggal 14 Juli sampai dengan 18 Juli 2014, berdasarkan pengawasan pihak satker telah menyelesaikan persyaratan administrasi yang terkait dengan penetapan tim teknis provinsi/kabupaten dan penetapan CP/CL penerima bansos pembangunan KBD.

Yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan KBD terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Pada Provinsi Jawa Tengah, target pembangunan KBD telah dilakukan rasionalisasi karena adanya kebijakan penghematan keuangan negara, namun hal tersebut belum dirinci berapa kebutuhan bongkar ratoon dan ekstensifikasi.
- b. Pada Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Subang bahwa pembangunan pembibitan tidak akan dihentikan/dilanjutkan karena pengolahan dianggap terlambat, sedangkan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon kegiatannya dihentikan atau tidak